

# Eksplorasi Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dan Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Pada Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Langonsari Kec Pameungpeuk Kab Bandung)

Dian Anita <sup>1\*</sup>, Fita Rahmawati Putri <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Akuntansi, Ekonomi, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Email: [diananit@digitechuniversity.ac.id](mailto:diananit@digitechuniversity.ac.id) <sup>1\*</sup>, [fita10221144@digitechuniversity.ac.id](mailto:fita10221144@digitechuniversity.ac.id) <sup>2</sup>

## Histori Artikel:

Dikirim 5 Maret 2025; Diterima dalam bentuk revisi 15 April 2025; Diterima 10 Mei 2025; Diterbitkan 1 Juni 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

## Suggested citation:

Anita, D., & Putri, F. R. (2025). Eksplorasi Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dan Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Pada Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Langonsari Kec Pameungpeuk Kab Bandung). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1330–1339. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4086>.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman akuntansi pemerintahan serta menganalisis pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa pada kualitas laporan keuangan desa. Studi ini dilakukan di Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan akuntansi pemerintahan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintahan di kalangan aparatur desa bervariasi, tergantung pada latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja mereka. Selain itu, tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan desa, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan transparansi pelaporan. Temuan penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif, guna memastikan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

**Kata Kunci:** Akuntansi Pemerintahan; Tingkat Pendidikan; Laporan Keuangan Desa; Transparansi Keuangan.

## Abstract

This study aims to explore the understanding of government accounting and analyze the influence of village officials' education level on the quality of village financial reports. The research was conducted in Langonsari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency, using a qualitative case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, observations, and document analysis to obtain a comprehensive picture of the implementation of government accounting at the village level. The findings indicate that the understanding of government accounting among village officials varies depending on their educational background and work experience. Moreover, the education level plays a crucial role in determining the quality of village financial reports, particularly in terms of compliance with government accounting standards and reporting transparency. The results of this study provide insights for local governments to enhance the capacity of village officials through more intensive training and education, ensuring more accountable and transparent village financial management.

**Keyword:** Government Accounting; Education Level; Village Financial Reports; Financial Transparency.

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa (Mardiasmo, 2018). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan secara mandiri. Namun, terdapat berbagai kendala yang dihadapi aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, salah satunya adalah rendahnya pemahaman terhadap konsep dan prinsip akuntansi pemerintahan (Hidayat & Lestari, 2021). Penelitian oleh Prasetyo dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa banyak aparatur desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami sistem pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat menurunkan efektivitas pengelolaan dana desa. Studi lain oleh Santoso dan Nugraha (2022) menemukan bahwa pemahaman akuntansi yang rendah dapat mengarah pada kesalahan pencatatan transaksi keuangan, kurangnya keterbukaan dalam pelaporan keuangan, serta potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Selain pemahaman akuntansi pemerintahan, tingkat pendidikan aparatur desa juga merupakan faktor penting dalam efektivitas laporan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa aparatur desa dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mampu memahami regulasi keuangan, mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintahan dengan baik, dan menyusun laporan keuangan desa secara lebih akurat. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Setiawan dan Putri (2023), yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa memiliki korelasi positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Bastian (2019) berpendapat bahwa efektivitas laporan keuangan desa tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi dan tingkat pendidikan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti dukungan kebijakan pemerintah daerah dan kualitas pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa. Penelitian oleh Sudrajat (2020) menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi yang diberikan kepada aparatur desa berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman mereka dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sementara itu, penelitian oleh Sari dan Hidayat (2021) menyoroti peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas laporan keuangan desa. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah membantu banyak desa dalam menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, efektivitas sistem ini masih bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan perangkat lunak tersebut. Putra dan Dewi (2022) menyatakan bahwa banyak aparatur desa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan Siskeudes akibat kurangnya pelatihan yang memadai.

Penelitian oleh Wicaksono dan Putri (2023) mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penyusunan laporan keuangan desa, termasuk kurangnya pelatihan bagi aparatur desa, keterbatasan pendampingan dari pemerintah daerah, serta minimnya akses terhadap teknologi akuntansi. Kendala-kendala ini menyebabkan banyak laporan keuangan desa yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan desa. Aparatur desa mengalami kesulitan dalam memahami standar akuntansi pemerintahan, yang berdampak pada efektivitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, tingkat pendidikan aparatur desa yang beragam juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Beberapa aparatur desa dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan secara optimal. Dalam pengelolaan keuangan desa, kualitas laporan keuangan menjadi aspek krusial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, di banyak desa, termasuk Desa Langonsari, masih terdapat berbagai kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah tingkat pemahaman aparatur desa terhadap akuntansi pemerintahan. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah bahwa proses perekrutan aparatur desa masih dilakukan melalui jalur orang dalam, bukan melalui prosedur rekrutmen yang seharusnya.

## RESEARCH ARTICLE

Hal ini menyebabkan aparatur desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sering kali kurang kompeten dalam menyusun laporan keuangan. Akibatnya, laporan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam aspek pencatatan, pelaporan, maupun transparansi. Upaya peningkatan kompetensi aparatur desa dalam bidang akuntansi pemerintahan masih terbatas. Pemerintah daerah hanya mengadakan pelatihan penyusunan laporan keuangan satu kali dalam setahun, yang dirasa belum cukup untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa secara signifikan. Minimnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan menyebabkan banyak aparatur desa kesulitan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik. Dengan permasalahan ini, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pemahaman aparatur desa terhadap akuntansi pemerintahan serta bagaimana tingkat pendidikan mereka berpengaruh pada kualitas laporan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana pemahaman akuntansi pemerintahan dan tingkat pendidikan aparatur desa mempengaruhi efektivitas laporan keuangan desa. Penelitian kualitatif, menurut Creswell (2018), bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif partisipan dalam lingkungan alamiah mereka. Denzin dan Lincoln (2018) menyatakan bahwa metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna sosial dari fenomena yang sedang diteliti. Metode studi kasus dipilih karena fokus penelitian ini pada satu unit analisis, yaitu Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk. Yin (2019) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus sangat tepat digunakan untuk menganalisis fenomena kompleks dalam konteks kehidupan nyata, khususnya dalam organisasi publik. Stake (2020) menambahkan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali hubungan antara variabel yang sulit diukur secara kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara pemahaman akuntansi pemerintahan, tingkat pendidikan aparatur desa, dan efektivitas laporan keuangan desa. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif membantu peneliti memahami pola yang muncul dalam data secara lebih sistematis.

### 2.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakup tingkat pendidikan aparatur desa, pemahaman akuntansi pemerintahan, dan kualitas laporan keuangan desa. Menurut Sugiyono (2021), objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal. Dalam penelitian ini, objek yang dianalisis adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan dan pelaporan keuangan desa. Penerapan akuntansi pemerintahan di tingkat desa sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2018). Aparatur desa yang menjadi fokus penelitian ini meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta perangkat desa lainnya yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman akuntansi pemerintahan dan tingkat pendidikan aparatur desa memengaruhi efektivitas laporan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Anthony dan Young (2019), yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi sangat berkorelasi dengan efektivitas pelaporan keuangan dalam organisasi publik.

Desa Langonsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dan terbentuk dari pemekaran Desa Sukasari pada tahun 1982. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 124/SK.1468-Pem.Des/1982, desa ini dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pada tahun 1983, Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 146/SK.PM.024-BK-HUK/1983 mengesahkan pemecahan Desa Sukasari menjadi dua desa, yakni

RESEARCH ARTICLE

Desa Sukasari dan Desa Langonsari. Nama Langonsari berasal dari kata *Palalargon*, yang artinya saung tinggi di pinggir hutan atau huma untuk mengintai binatang buruan, dan *Sari* atau *Asri*, yang berarti indah. Dengan demikian, Langonsari secara harfiah berarti suatu bangunan indah tempat mengintai dengan harapan menjadi pusat perhatian banyak orang. Desa Langonsari memiliki luas wilayah 153 km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan desa-desa lain seperti Desa Malakasari di utara, Kelurahan Andir di timur, Desa Bojongmangu di 1333jarah, dan Desa Sukasari di barat. Koordinat geografis Desa Langonsari terletak pada 107.60434 LS/LU dan -70.20245 BT/BB. Dalam 1333jarah penyelenggaraan pemerintahan, Desa Langonsari telah mengalami beberapa pergantian kepala desa, dengan masing-masing kepala desa membawa perubahan dalam kebijakan dan pengelolaan desa.



Gambar 1. Kantor Desa Langonsari

Tabel 1. Nama-Nama Kepala Desa Langonsari dari Tahun ke Tahun

| Nama              | Tahun           | Keterangan           |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| H. Iya Hadiya     | 1983 - 1985     | Pejabat Kepala Desa  |
| Sopandi Daniswara | 1985 - 1986     | Pejabat Kepala Desa  |
| Tasmi Sugiri      | 1986 - 1986     | Pejabat Kepala Desa  |
| Sopandi Daniswara | 1986 - 1994     | Kepala Desa          |
| Ana Priatna       | 1994 - 1995     | Penjabat Kepala Desa |
| Nandang Sw.       | 1995 - 2003     | Kepala Desa          |
| E. Wiharsa        | 2003 - 2003     | Pejabat Kepala Desa  |
| Ahadiat Sapari    | 2003 - 2008     | Kepala Desa          |
| Ahadiat Sapari    | 2008 - 2014     | Kepala Desa          |
| E. Wiharsa        | 2014 - 2014     | Pejabat Kepala Desa  |
| Sudrajat Wijaya   | 2014 - 2019     | Kepala Desa          |
| E. Wiharsa        | 2019 - Sekarang | Kepala Desa          |

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan elemen penting dalam penelitian karena berfungsi untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Jika data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan tujuan penelitian, hal tersebut dapat menghambat atau bahkan merusak proses penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, pengumpulan data harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan aparatur desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kendala yang dihadapi oleh aparatur desa dalam penyusunan laporan keuangan (Kvale & Brinkmann, 2021; Bryman,

RESEARCH ARTICLE

2021). Observasi dilakukan untuk mengamati langsung bagaimana aparat desa menyusun laporan keuangan dan bagaimana sistem pencatatan yang digunakan, dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih objektif dan mendalam (Silverman, 2020). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti laporan keuangan desa dan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, yang digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi (Bowen, 2019). Terakhir, studi pustaka dilakukan dengan meninjau literatur dari jurnal ilmiah, buku, serta regulasi terkait akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa untuk membangun landasan teori yang kuat dalam penelitian ini (Hart, 2018).

### 2.3 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen yang menghasilkan sejumlah besar informasi, yang kemudian dianalisis untuk mencari pola atau tema tertentu. Tahap kedua, reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah ke dalam bentuk yang lebih sistematis (Miles & Huberman, 2014). Data yang relevan dengan tujuan penelitian akan dipilih dan dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti pemahaman akuntansi pemerintahan, tingkat pendidikan aparat desa, dan kualitas laporan keuangan desa (Braun & Clarke, 2006). Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk naratif, tabel, diagram, atau matriks, yang memungkinkan peneliti untuk melihat pola dan hubungan antara variabel yang diteliti (Miles *et al.*, 2018). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antar tema dalam data, membandingkan temuan dengan teori dan penelitian terdahulu, serta melakukan interpretasi makna dengan mempertimbangkan konteks sosial dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa (Braun & Clarke, 2006; Creswell, 2018).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil

Dari hasil wawancara mendalam dengan pihak Pemerintahan Desa Langonsari mengenai pemahaman akuntansi pemerintahan dan pengaruh tingkat pendidikan aparat desa terhadap kualitas laporan keuangan desa, penulis memperoleh informasi mengenai laporan keuangan desa, kendala dalam penyusunan laporan keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaporan keuangan di Desa Langonsari. Wawancara ini memberikan gambaran tentang berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparat desa dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Tabel 2. Informasi Informan

| No | Nama                    | Jabatan            |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1  | Suryana Nursolidah, S.T | Sekretaris Desa    |
| 2  | Peri Bungsu Hermawan    | Kaur Keuangan Desa |

Dari wawancara mendalam dengan pihak Pemerintahan Desa Langonsari mengenai pemahaman akuntansi pemerintahan dan pengaruh tingkat pendidikan aparat desa terhadap kualitas laporan keuangan desa, penulis memperoleh gambaran mengenai karakteristik informan. Informan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari lulusan SMA hingga sarjana (S1), dengan pengalaman kerja sebagai aparat desa yang bervariasi antara dua hingga lebih dari lima tahun. Pengalaman kerja ini berpengaruh pada pemahaman mereka tentang akuntansi pemerintahan. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa

## RESEARCH ARTICLE

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun, ada juga informan yang tidak mengikuti pelatihan khusus mengenai akuntansi pemerintahan, sehingga pemahaman mereka lebih banyak diperoleh dari pengalaman kerja sehari-hari. Walaupun demikian, mereka merasa bahwa pelatihan yang diberikan masih belum cukup untuk memahami seluruh aspek pelaporan keuangan desa dengan baik. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, beberapa informan mempelajari sistem pelaporan keuangan desa secara mandiri melalui sumber lain, seperti membaca regulasi yang berlaku dan berdiskusi dengan sesama aparatur desa. Selain itu, informan juga memiliki tugas tambahan di luar pengelolaan keuangan desa, seperti administrasi kependudukan dan pelayanan masyarakat, yang kadang membuat fokus terhadap pencatatan keuangan menjadi terbagi. Tingkat pemahaman informan terhadap teknologi juga beragam; beberapa di antaranya mahir menggunakan komputer dan perangkat lunak akuntansi, sementara yang lainnya masih mengandalkan pencatatan manual.

### 3.1.1 Pemahaman Akuntansi Pemerintahan di Desa Langonsari

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntansi pemerintahan di Desa Langonsari telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi keuangan yang berlaku, dengan dukungan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Namun, masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip akuntansi, perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem pencatatan. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan desa dilakukan secara sistematis sesuai prosedur yang ditetapkan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang akuntansi pemerintahan di kalangan aparatur desa, yang menunjukkan perlunya pelatihan lebih intensif dan pendampingan dari tenaga ahli untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, aparatur desa menghadapi beberapa kesulitan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang akuntansi, perubahan regulasi yang sering terjadi, serta kendala teknis dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Meski demikian, dengan adanya pelatihan, bimbingan teknis, dan pemanfaatan teknologi, pemerintah desa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemahaman yang baik mengenai akuntansi terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan pencatatan yang rapi dan sistematis, laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi risiko penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan rutin, pendampingan ahli, dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

### 3.1.2 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola keuangan. Aparatur desa yang memiliki pendidikan di bidang keuangan atau akuntansi lebih mudah memahami konsep akuntansi pemerintahan, regulasi keuangan, serta penggunaan sistem pencatatan digital seperti Siskeudes. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, sering kali diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan baik. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, berbagai program pelatihan dan pendidikan lanjutan telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga terkait seperti BPKP. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, termasuk regulasi terbaru, penyusunan laporan keuangan sesuai SAP, dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Meskipun pelatihan ini bermanfaat, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan frekuensi dan jumlah peserta yang dapat mengikuti pelatihan secara langsung. Oleh karena itu, peningkatan intensitas dan cakupan pelatihan menjadi langkah penting dalam memperkuat kompetensi aparatur desa. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan desa. Aparatur desa yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih teliti dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, sehingga meminimalkan kesalahan administratif dan meningkatkan transparansi serta

RESEARCH ARTICLE

akuntabilitas. Namun, selain pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman juga berperan penting dalam membangun kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih profesional dan sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu, kombinasi antara tingkat pendidikan yang memadai dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan desa yang lebih berkualitas.

### 3.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Desa

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan desa saat ini telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pengawasan dari pemerintah daerah, serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan desa, seperti kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap akuntansi pemerintahan, keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan dalam pengumpulan dokumen pendukung, serta kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Untuk mengatasi tantangan ini, pelatihan dan bimbingan teknis menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai standar. Mekanisme audit dan evaluasi juga telah diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, BPK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Hasil audit digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa agar semakin baik ke depannya. Beberapa faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan desa meliputi pemahaman perangkat desa terhadap akuntansi pemerintahan, tingkat pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, diperlukan pelatihan rutin, pemanfaatan sistem pencatatan yang efektif, peningkatan transparansi kepada masyarakat, serta koordinasi yang baik antar perangkat desa.

## 3.2 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman aparatur desa terhadap akuntansi pemerintahan masih bervariasi, dengan pengaruh signifikan dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Aparatur desa yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan pengalaman lebih lama cenderung lebih memahami prinsip akuntansi pemerintahan dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan lebih rendah atau pengalaman yang terbatas. Hal ini sesuai dengan temuan Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi sektor publik sangat penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan wawancara, beberapa aparatur desa menganggap akuntansi pemerintahan sebagai hal yang kompleks dan sulit diterapkan karena adanya regulasi yang sering berubah dan memerlukan pemahaman mendalam. Kurangnya latar belakang pendidikan di bidang akuntansi membuat sebagian besar aparatur desa harus belajar secara mandiri atau bergantung pada pengalaman kerja sehari-hari. Beberapa aparatur desa masih memandang pengelolaan keuangan desa hanya sebatas pencatatan pengeluaran dan pemasukan tanpa memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas yang penting dalam pengelolaan dana desa (Haryanto & Sari, 2020). Pendidikan formal saja tidak cukup untuk menjamin kualitas laporan keuangan desa yang baik. Pengalaman kerja dan pelatihan teknis memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Aparatur desa yang sudah berpengalaman lebih cenderung memiliki pemahaman praktis yang lebih baik, meskipun pendidikan formal mereka terbatas. Hal ini mendukung temuan Bastian (2019), yang menyatakan bahwa pelatihan dan pengalaman langsung sangat diperlukan dalam meningkatkan keterampilan teknis aparatur desa. Seiring dengan itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi pada kemampuan aparatur desa dalam memahami dan menerapkan regulasi keuangan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur prinsip-prinsip laporan keuangan desa (Santoso & Nugraha, 2022).

## RESEARCH ARTICLE

Namun, meskipun memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masih banyak aparatur desa yang kesulitan dalam mengimplementasikan regulasi tersebut, terutama dalam penerapan teknis di lapangan (Flick, 2018). Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah membantu meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan desa. Siskeudes memungkinkan pencatatan transaksi keuangan desa secara sistematis dan terintegrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, banyak aparatur desa yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem ini secara optimal. Beberapa kendala utama dalam penerapan Siskeudes adalah kurangnya pemahaman teknis, terutama di kalangan aparatur desa yang masih terbiasa dengan pencatatan manual dan belum sepenuhnya beralih ke sistem digital. Selain itu, pelatihan yang diberikan oleh pemerintah masih bersifat umum dan tidak cukup detail dalam mengatasi permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan, dan tidak adanya pendampingan berkelanjutan membuat para aparatur desa kesulitan dalam mengatasi kendala teknis. Kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntansi pemerintahan juga menjadi masalah besar. Sebagian aparatur desa masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa (Gibbs, 2018). Kesulitan yang dihadapi aparatur desa dalam mengoperasikan Siskeudes dan penerapan akuntansi pemerintahan juga sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Putra & Dewi (2022), yang mencatat bahwa pemahaman teknis yang terbatas menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penggunaan teknologi keuangan di tingkat desa. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah meningkatkan pelatihan teknis yang lebih aplikatif dan berbasis pada studi kasus nyata, serta menyediakan pendampingan langsung dari tenaga ahli akuntansi pemerintahan agar aparatur desa dapat mengatasi kendala teknis yang mereka hadapi (Patton, 2015).

Akuntansi pemerintahan memegang peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan desa. Selain itu, faktor kompetensi aparatur desa, transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengendalian internal yang kuat juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan (Mardiasmo, 2018). Dengan pemanfaatan teknologi seperti Siskeudes, pengelolaan keuangan desa dapat lebih efisien dan akurat. Di sisi lain, pengawasan yang memadai dari pemerintah daerah dan kesadaran tinggi akan pentingnya prinsip kejujuran dan integritas dalam pengelolaan keuangan juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa (Hidayat & Lestari, 2021). Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa, berdasarkan wawancara, adalah kedisiplinan dalam pencatatan keuangan, pemahaman terhadap regulasi, kemampuan dalam mengoperasikan Siskeudes, dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa, langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan akses aparatur desa terhadap pendidikan dan pelatihan teknis, menyediakan bimbingan dan pendampingan secara berkala, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti Siskeudes untuk pencatatan keuangan yang lebih efisien dan transparan. Selain itu, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap laporan keuangan desa untuk memastikan kesalahan dalam penyusunan laporan dapat dikoreksi sejak dini, guna mencapai akuntabilitas yang lebih baik (Braun & Clarke, 2006; Creswell, 2018). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemahaman aparatur desa terhadap akuntansi pemerintahan akan meningkat, sehingga kualitas laporan keuangan desa semakin baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yang pada gilirannya akan mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih optimal dan transparan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman aparatur desa terhadap akuntansi pemerintahan serta menganalisis pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintahan dan tingkat pendidikan

RESEARCH ARTICLE

aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Aparatur desa dengan pemahaman akuntansi yang baik mampu menyusun laporan keuangan yang lebih rapi, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan kemampuan dalam memahami konsep akuntansi, penggunaan teknologi seperti Siskeudes, serta penerapan regulasi keuangan yang lebih baik. Sebaliknya, aparatur desa dengan pemahaman dan pendidikan yang rendah cenderung mengalami kendala dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Kombinasi antara pemahaman yang baik dan pendidikan yang memadai berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Pemahaman akuntansi pemerintahan yang baik berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Dengan pemahaman yang baik, aparatur desa dapat mencatat transaksi dengan tepat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengelola dana desa secara lebih efisien dan efektif. Selain itu, laporan keuangan yang sesuai standar mempermudah proses audit dan evaluasi oleh pihak terkait, yang pada gilirannya mengurangi kendala administratif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Untuk meningkatkan pemahaman akuntansi pemerintahan di kalangan aparatur desa, diperlukan pelatihan rutin, pendampingan dari tenaga ahli, disiplin dalam pencatatan keuangan, serta pemanfaatan teknologi seperti Siskeudes. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat juga diperlukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas laporan keuangan desa dapat meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Supriyadi, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Teknologi Digital.
- 2) Ibu Meilani Purwanti, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
- 3) Para Dosen Universitas Teknologi Digital. yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
- 4) Pemerintah Desa Langonsari, yang telah memberikan izin dan membantu dalam pengumpulan data penelitian.
- 5) Keluarga tercinta, terutama orang tua saya mamah Santi Komla dan papah Ahdiar Saaripudin yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti.
- 6) Adik saya tercinta, Fina Rachmawati Putri, Sefty Permta Putri dan Makeen Althair Muazzam Nata yang selalu memberikan semangat dan menjadi salah satu motivasi terbesar dalam menyelesaikan penelitian ilmiah ini.
- 7) Sahabat saya tersayang, Ridha Suci Nurdianti, Nadiah Hoirunnisa, Ameliana Agustin dan Citra Amelia yang selalu memberikan dukungan, berbagi ilmu, serta menjadi penyemangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan penelitian ilmiah ini.
- 8) Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penelitian ilmiah ini.

## 6. Referensi

Bazeley, P. (2017). Integrating analyses in mixed methods research.

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education* (Vol. 368). Boston, MA: Allyn & Bacon.

## RESEARCH ARTICLE

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative research journal*, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Dohona, I. M., Hulu, F., Lahagu, P., & Telaumbanua, E. (2023). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa Di Desa Awela Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6558-6567.
- Flick, U. (2022). An introduction to qualitative research.
- Gibbs, G. R. (2018). Analyzing qualitative data.
- Indonesia, K. D. N. R. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Jw, C. (2009). Research design-qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *SAGE, Ca: ofprnia*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Miles, B. W., & Jozefowicz-Simbeni, D. M. H. (2010). Naturalistic inquiry. *The handbook of Social Work research method*, 415-425.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods*. sage.
- Riessman, C. K. (2008). *Narrative methods for the human sciences*. Sage.
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23-34.
- Rusmana, O., Setyaningrum, D., & Yuliansyah, M. (2017). Akuntansi Pemerintahan Daerah. *Jakarta. Salemba Empat*.
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage publications.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.